

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa sentralisasi pemerintah telah berakhir diganti dengan otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari pemerintah pusat. UU No. 32 tahun 2004 juga menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan kata lain, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. UU No. 32 tahun 2004 mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat.

PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah pada pasal 4 menjelaskan LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas, (a) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan (b) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Capaian Kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah diukur berdasarkan indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah secara terukur dengan dadaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

Pemerintah daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, LPPD suatu pemerintah daerah merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Sudarsana, 2013).

Dewasa ini, masyarakat lebih peka terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karenanya dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk dapat menyampaikan segala bentuk kegiatan dalam laporan pertanggungjawaban yang berisikan laporan keuangan.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas laporan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. PP Nomor 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2009) mengatakan kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerahnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat melalui hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang harus diaudit

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja keuangan pemerintah merupakan ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan pendapatan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah serta peningkatan keberhasilan pendapatan dan pengeluaran keuangan yang diraih pemerintah daerah. Salah satu komponen dalam pengeluaran adalah belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu dilakukan pengukuran atas pertumbuhan belanja modal. Pengukuran rasio pertumbuhan belanja modal dilakukan dengan melihat pertumbuhan dari belanja modal suatu pemerintah daerah. Banyaknya pembangunan membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, peneliti memfokuskan pada variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan temuan audit BPK.

Damanpour (1991) ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas. Semakin besar ukuran pemerintah daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan suatu pemerintah daerah semakin baik. Penelitian Achmad, dkk (2017) memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tingkat kekayaan daerah berupa banyaknya sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Tingkat kekayaan daerah dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan hak pemerintah daerah sebagai penambah dari nilai kekayaan yang bersih. Tingginya tingkat kekayaan daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berjalan dengan baik. Penelitian Dasmal, dkk (2020) memberikan bukti empiris bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pada pusat menunjukkan kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin rendah tingkat ketergantungan pada pusat maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian Wijayanti & Suryandani (2020) memberikan bukti empiris bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Temuan audit BPK diperoleh dari pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Temuan berupa penyalahgunaan anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila terdapat temuan audit BPK dalam laporan keuangan maka kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota dianggap buruk. Penelitian Masdiantini & Erawati (2016) memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho & Prasetyo (2018) yang melakukan penelitian tentang pengaruh

ukuran pemerintah daerah, ketergantungan daerah, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini ditambahkan dua variabel independen yaitu tingkat kekayaan daerah dan temuan audit BPK untuk memperluas hasil penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda dari beberapa peneliti terdahulu. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi kontribusi kepada pemerintahan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Untuk menganalisis pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan wacana keilmuan dalam memahami pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Secara kebijakan

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai pemerataan anggaran pemerintah daerah dan pengawasannya.

3. Secara praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi masyarakat umum

Sebagai pengetahuan akan seberapa berpengaruhnya ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat memperoleh pemahaman secara runtut dan sistematis. Untuk memudahkan pemahaman dan mencapai sasaran yang diinginkan, sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas hasil analisis dari hipotesis yang telah dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.